

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS**

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik maka diperlukan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban atas segala tugas dan kewajiban yang

diamanatkan kepadanya. Pertanggung jawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Dalam melakukan evaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP 2016**

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	> 100%	Sangat Berhasil
2.	75 % - 100 %	Berhasil
3.	55 % - 75 %	Cukup Berhasil
4.	< 50%	Kurang Berhasil

### 3.1. Capaian Kinerja

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran RPJMD Tahun 2016, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 dengan realisasinya.

Capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana**  
**dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)	41.86% (18 dari 43 SKPD)	81.82 %
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	21,9 % (9 dari 43 SKPD)	16,3% (7 dari 43 SKPD = 100 %)	74.42%
	3) Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender	7 Instansi Vertikal 42,42 % ( 14 dari 33 lembaga)	9 Instansi Vertikal 60,60 % (20 dari 33 lembaga)	142,85 %
2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan	1) Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta Posisi Perempuan	100 %	100 %	100 %
	2) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan Bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	100 %
	3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	30,20 %	31,30 %	103.6%
	4) Persentase Partipasi Angkatan Kerja Perempuan	36.95 %	36.90 %	99,86 %
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100%
	2) Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	100%	100 %
	3) Persentase data terpilah terkait Kesejahteraan Anak	100 %	100%	100 %

	4) Persentase kab/ kota yang membentuk kota layak Anak (KLA)	28,57 % (2 dari 7 kab/kota)	28,57 % (2 dari 7 kab/kota)	100%
	5) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak TK.Nasional	15,58 %(12 dari 77 anak)	15,58 %(12 dari 77 anak)	100 %
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	1) Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100 %	100 %	100 %
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	81,75 %	83.91 %	102.64 %
	3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I	10,95 %	10,90 %	%

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang (*performance improvement*).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada Tahun 2016, sebagai berikut :

#### Tujuan :

**Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan,** dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan</b>
----------------------------	----------	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)	53,49% (23 dari 43 SKPD)	104,55 %
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	21,9 % (9 dari 43 SKPD)	16,3% (7 dari 43 SKPD)	74,42%
		7 Instansi Vertikal	7 Instansi Vertikal	
	3) Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender	42,42 % ( 14 dari 33 lembaga)	60,60 % (20 dari 33 lembaga)	142,85 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 1</b>				<b>107,27 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat 3 (tiga) indikator yang melebihi target. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 107,27% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

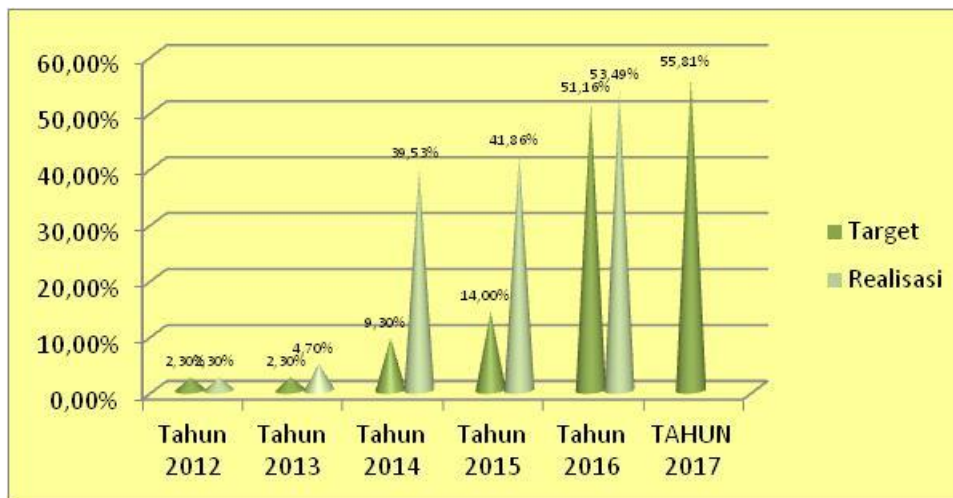
Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 1, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Untuk mengukur pencapaian optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.

Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tercapai sebesar 53,49% (23 dari 43 SKPD), yaitu BPPKBPA, BAPPEDA, Distanbunak, BPAD, DPPKAD, KESBANGPOL, DINKESSOS, DINKES, BPPTM, BPMPD, BLDH, Biro Hukum, BKP, SATPOL PP, Inspektorat, Dispora, RUSD, BPB, BKD, DIKLAT, Disperindag, KUMKM dan Diknas), mengalami peningkatan yang bila dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 39,53% (17 dari 43 SKPD) dan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 44,18% (19 dari 43 SKPD).

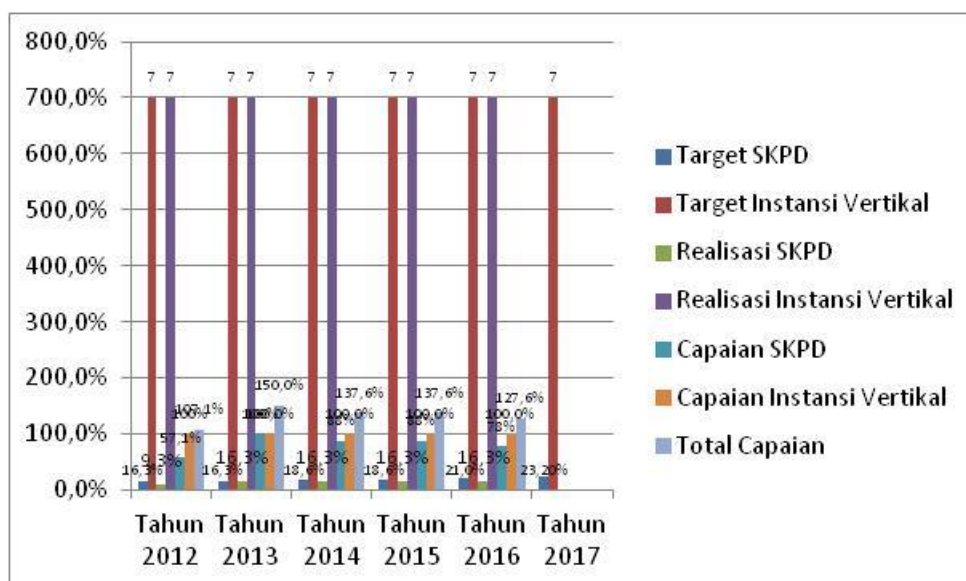
Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tahun ini sebesar 53,49% (23 dari 43 SKPD), sudah mendekati target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 55,81% (24 dari 43 SKPD), dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.1**  
**Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG**  
**Tahun 2012 - 2016**



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar 51,16 % dan realisasi pencapaian target adalah 53,49% jadi dapat dikatakan capaian realisasi Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tahun 2016 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

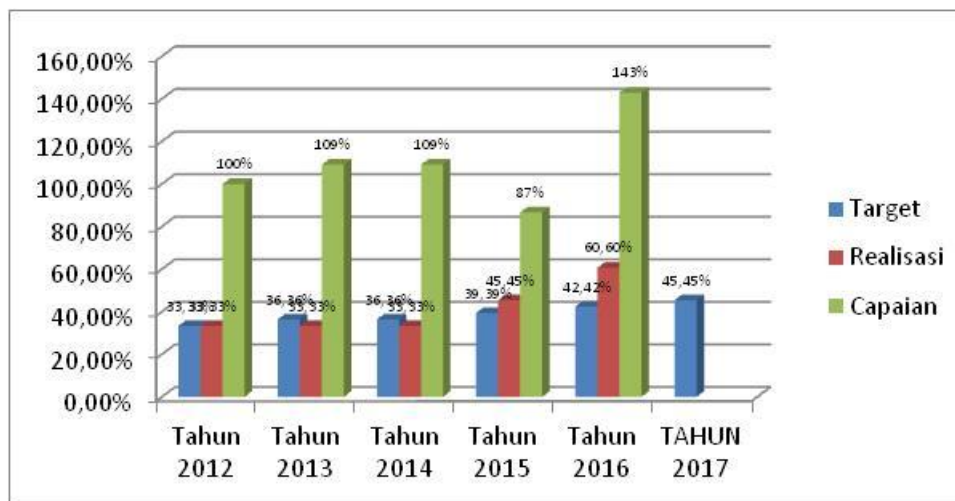
**Gambar 3.2**  
**Persentase SKPD yang memiliki data terpilah**  
**Tahun 2012 - 2016**



Indikator Persentase yang memiliki data terpilah pada tahun 2016 dengan target 21,9% realisasi yang di capai yaitu sebesar 18,6%, maka dapat dikatakan persentase skpd yang memiliki data terpilah belum mencapai target. Persentase SKPD data terpilah tersebut belum tercapai dikarenakan masih adanya skpd yang belum melakukan data terpilah. Pemilahan data biasanya dilakukan untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan pada suatu bidang tertentu. Pemilihan data terpilah dapat dilakukan menurut jenis kelamin sehingga dengan begitu dapat menggambarkan status serta posisi perempuan dan laki laki di seluruh bidang pembangunan.



**Gambar 3.3**  
**Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang**  
**Berbasis Gender**  
**Tahun 2012 - 2016**



Dalam rangka Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan sebesar 42,42% (14 dari 33 lembaga) sedangkan realisasi yang telah dicapai sebesar 60,60% (20 dari 33 lembaga) maka dapat dikatakan bahwa target yang ditetapkan dikualifikasikan sangat berhasil. Hal ini menandakan semakin baiknya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori sangat berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan” antara lain adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kurangnya komitmen dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).



Dalam pelaksanaan rapat koordinasi Pokja PUG, peserta yang seharusnya hadir adalah para pejabat eselon II, namun peserta rapat yang hadir diwakili adalah eselon III, eselon IV dan staf.

2. Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah dalam proses perencanaan dan evaluasi.
3. Belum optimalnya peran Organisasi sosial politik, Organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Advokasi mengenai PUG secara intensif kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Memperbanyak pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan peran dan fungsi pokja PUG yang sudah dibentuk.
3. Mendata kembali ke 43 SKPD untuk melihat jumlah keseluruhan SKPD yang sudah memiliki data terpilah gender.
4. Advokasi secara intensif kepada Orsospol, Organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar berperan secara optimal dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
5. Memberi panduan pada SKPD mengenai penyusunan dan pengumpulan data terpilah agar advokasi – advokasi yang mereka lakukan dapat lebih tajam dan terukur.

#### Tujuan :

**Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 2</b>	:	Meningkatnya Kualitas Hidup dan peran Perempuan di segala Bidang Pembangunan
----------------------------	---	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**.

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan	1) Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta Posisi Perempuan	100 %	100 %	100 %
	2) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan Bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	100 %
	3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	30,20 %	31,30 %	103.6%
	4) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	36.95 %	35.80 %	96,88 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 2</b>				<b>100,12 %</b>

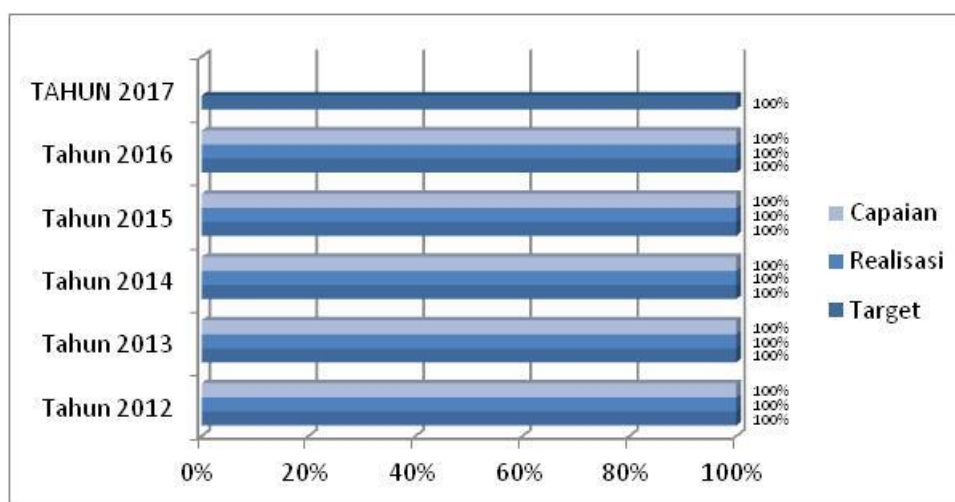
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 100,12% atau tercapai dengan kualifikasi berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 2, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan. Untuk mengukur pencapaian Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 4 (empat) indikator.

Indikator Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan tercapai 100% dimana target yang telah ditetapkan sebesar 100 % yaitu 1 (satu) kebijakan yaitu Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu (PHI) yang ke – 87 Tahun 2016 dengan menghasilkan pemenang-pemenang dari beberapa kategori yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis, capaian kinerja Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan sebesar 100%, sedangkan target pada jangka menengah sebesar 100%, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.4**  
**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan**  
**Tahun 2012 - 2016**

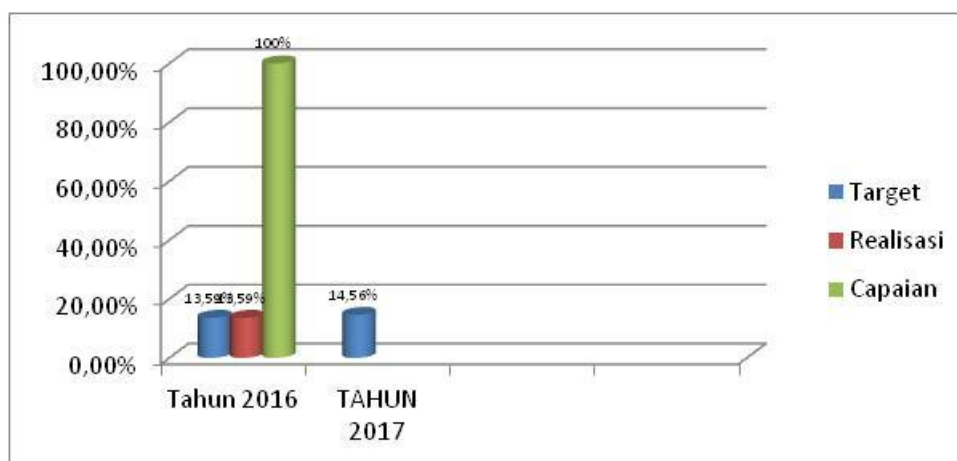


Indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA tercapai sebesar 13,59 % (42 Kelompok dari 309 Kelompok) dari target yang telah ditetapkan sebesar 13,59 % (42 Kelompok dari 309 Kelompok).

Indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA tidak dapat

dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya, ini dikarenakan karena Indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA merupakan indikator baru. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA sebesar 13,59 % (42 Kelompok dari 309 Kelompok), sedangkan target pada jangka menengah sebesar 14,56 % (45 Kelompok dari 309 Kelompok) dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.5**  
**Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang Mendapatkan**  
**Bimbingan dari Manajemen usaha dari BPPKBPA**  
**Tahun 2016**



Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah tercapai sebesar 28,94% dari target 6,02% dengan rumusan :

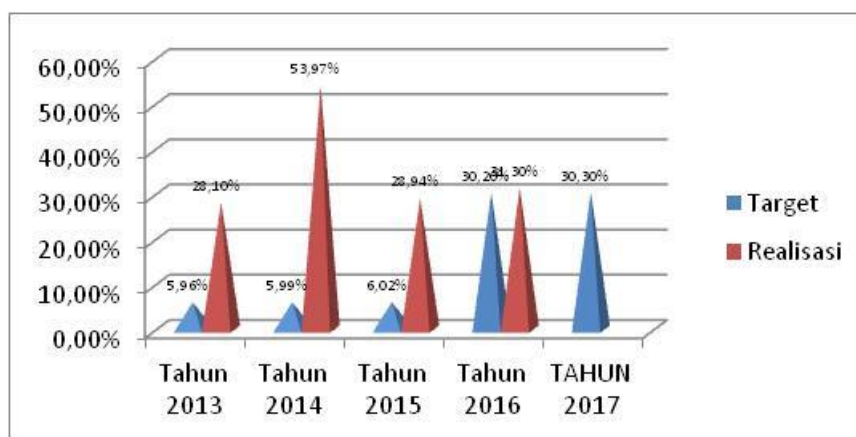
- Rekapitulasi data dari Kab/Kota dengan rumusan :  $\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah} \div \text{Jumlah pekerja perempuan} \times 100 = 31.30\%$

Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan persentase perempuan di lembaga pemerintah. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun

2015 yaitu sebesar 28,94%. Pencapaian pada tahun 2016 ini juga telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30,20% dan dapat dikualifikasikan berhasil.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah sampai dengan tahun ini sebesar 31,30% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 30,30%, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.6**  
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**  
**Tahun 2012 - 2016**



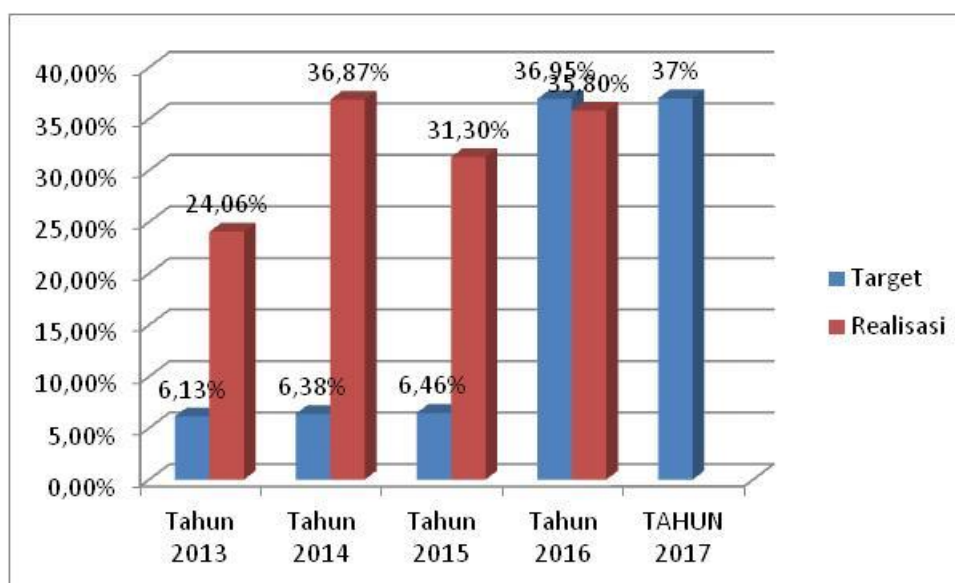
Indikator Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tercapai sebesar 35,80% dari target 36,95% dengan rumusan :

- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dibagi dengan Jumlah angkatan kerja perempuan.
- Rekapitulasi Data Provins dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota ( $250,6 / 7 = 35,80\%$ ).

Pencapaian Indikator Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 28,94% walaupun pencapaian pada tahun 2016 ini belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 36,95%.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah sampai dengan tahun ini sebesar 35,80% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 37%, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.7**  
**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
**Tahun 2012 - 2016**



Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan” antara lain adalah :

1. Kurang tersedianya data yang siap pakai guna mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan”.
2. Kegiatan yang mendukung indikator Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta Posisi Perempuan masih terbatas pada kegiatan yang bersifat nasional yaitu peringatan hari ibu.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Melakukan pendataan terkait peran perempuan, kelompok ekonomi produktif perempuan, dan lainnya guna mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan”.
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perempuan, organisasi sekolah, organisasi profesi, dan Institusi media massa dalam mencapai Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan.

**Tujuan :**

**Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,** dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 3</b>	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang
----------------------------	---	---

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak	1) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100%



Kekerasan dan Perdagangan Orang	2) Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	100%	100 %
	3) Persentase data terpilah terkait Kesejahteraan Anak	100 %	100%	100 %
	4) Persentase kab/ kota yang membentuk kota layak Anak (KLA)	28,57 % (2 dari 7 kab/kota)	28,57 % (2 dari 7 kab/kota)	100%
	5) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak TK.Nasional	15,58 %(12 dari 77 anak)	15,58 %(12 dari 77 anak)	100 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 3</b>				<b>100 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%.

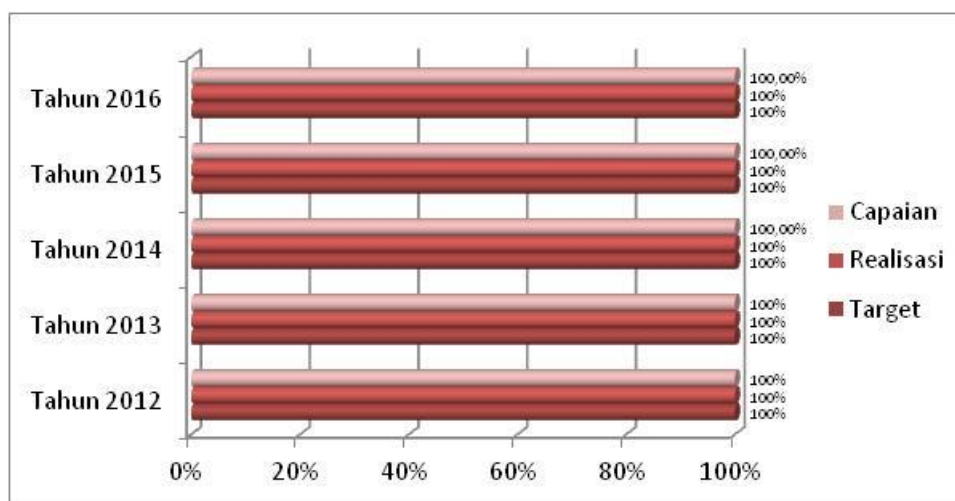
Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 3, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang.

Untuk mengukur pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 5 (lima) indikator. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap korban yang melapor ke P2TP2A dapat di tangani dengan maksimal oleh P2TP2A.

Pencapaian target tersebut dapat terealisasi 100% dikarenakan panduan dalam penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai prosedur yang ada. Acuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sudah sesuai dengan standart pelayanan minimal dibidang layanan terpadu bagi korban kekerasan anak dan perempuan.

Capaian Indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu tahun 2016 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, ini dikarenakan Indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu merupakan indikator baru.

**Gambar 3.8**  
**Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih didalam UPT Tahun 2012 – 2016**

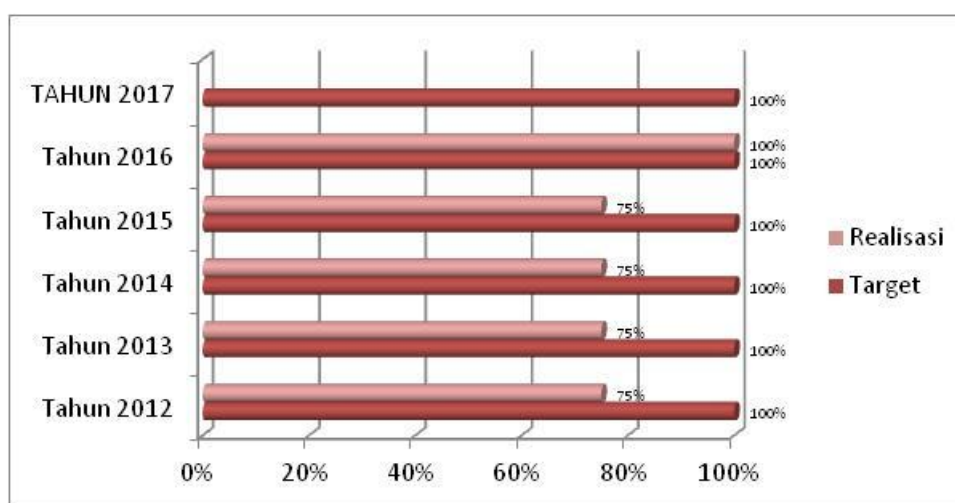


Indikator Jumlah Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak tercapai sebesar 100%. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Perjanjian Kerjasama dengan Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Wilayah Sumatera dengan membentuk suatu forum yang diberi nama Forum Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (FP3A) yang salah satu fungsinya adalah sebagai Perkuatan kerjasama dan langkah langkah pencegahan, pemberantasan serta perlindungan dan penanganan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak lalu Penyusunan Kajian Akademik terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Laporan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman pengarusutamaan hak anak, Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2013 tentang Gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Perjanjian kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi se-wilayah Sumatera tentang Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Pencapaian ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 2 kebijakan : MoU tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, dan Kerjasama penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking dengan Kepolisian Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.

Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015 yang hanya sebesar 75%. Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun ini sebesar 100% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 100%, dapat dilihat pada gambar berikut :

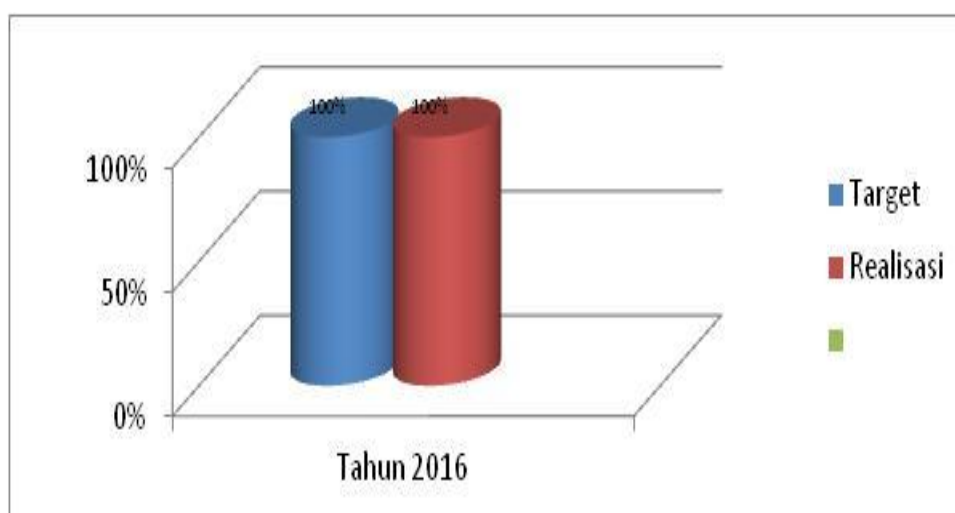
**Gambar 3.9**  
**Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak**  
**Tahun 2012 - 2016**



Indikator Persentase Data Terpilah terkait Kesejahteraan Anak tercapai sebesar 100% yang diperoleh dari instansi yang difasilitasi terkait data terpilah kesejahteraan anak yaitu : BPS, Dinsos, Dinkes, Kepolisian, Depag, LSM, Organisasi profesi, PKK, Kejaksaan, Pengadilan, Advocate.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Data Terpilah terkait Kesejahteraan Anak tercapai sebesar 100% dan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 100, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.10**  
**Persentase Data Terpilah Terkait Kesejahteraan Anak**  
**Tahun 2016**

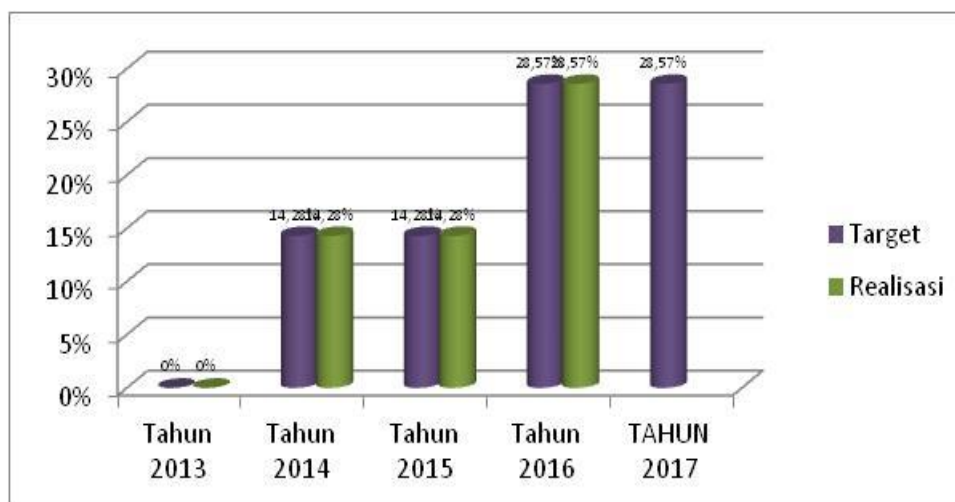


Indikator Persentase kab/kota yang membentuk kota layak Anak (KLA) pada tahun 2016 sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 28,57% (2 dari 7 Kabupaten/Kota). Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 14,28% (1 dari 7 kab/kota) yaitu kabupaten Bangka Tengah mendeklarasikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase kab/ kota yang membentuk kota layak Anak

(KLA) tercapai sebesar 28,57% (2 dari 7 Kab/Kota) dan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 28,57% (2 dari 7 Kab/Kota), dapat dilihat pada gambar berikut :

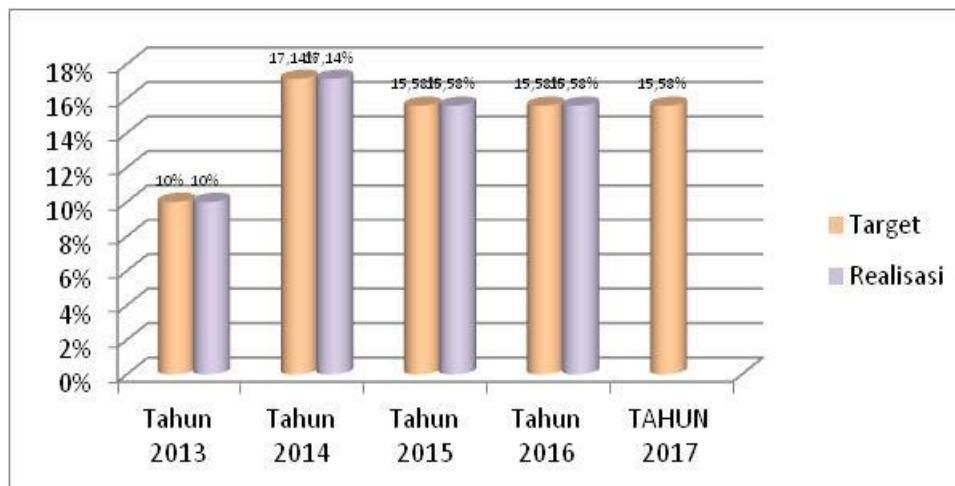
**Gambar 3.11**  
**Persentase Kabupaten/ Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)**  
**Tahun 2013 - 2016**



Indikator Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak TK.Nasional pada tahun 2016 sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15,58% (12 dari 77 Anak). Pencapaian ini tetap bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 15,58% (12 dari 77 Anak).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak TK.Nasional tercapai sebesar 15,58% (12 dari 77 Anak) dan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 15,58% (12 dari 77 anak), dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.12**  
**Persentase Anak Ayng Mengikuti Forum Anak Tk.Nasional**  
**Tahun 2012 - 2016**



Dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang dari tahun ke tahun. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% dikualifikasikan sudah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tahun 2016 lebih tinggi bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 58,33%.

Pencapaian indikator kinerja memang sudah mencapai target yang sudah ditetapkan akan tetapi masih terdapat hambatan dan kendala yang harus dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang” antara lain adalah :

1. Kebijakan yang dihasilkan baru sebatas MoU, Peraturan Gubernur, dan Kajian Akademik, seharusnya kebijakan yang dihasilkan dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) agar adanya payung hukum dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Belum optimalnya peranan instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

3. Belum optimalnya peran P2TP2A sebagai ujung tombak yang masih berfokus kepada pusat layanan, belum berperan sebagai pusat informasi dan pemberdayaan.
4. Belum optimalnya kebijakan Kabupaten/Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA).

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Advokasi kepada legislative agar mendapat dukungan dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Menyusun Standar Pelayanan (SP) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pembagian tugas yang jelas pada instansi yang terlibat.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait agar penerapan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dapat berjalan optimal.
4. Peningkatan kapasitas P2TP2A sebagai pusat layanan, pusat informasi dan pemberdayaan.
5. Optimalisasi Kebijakan dan percepatan pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

**Tujuan :**

**Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana,** dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 4</b>	:	Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas
----------------------------	---	---

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.**



Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4**

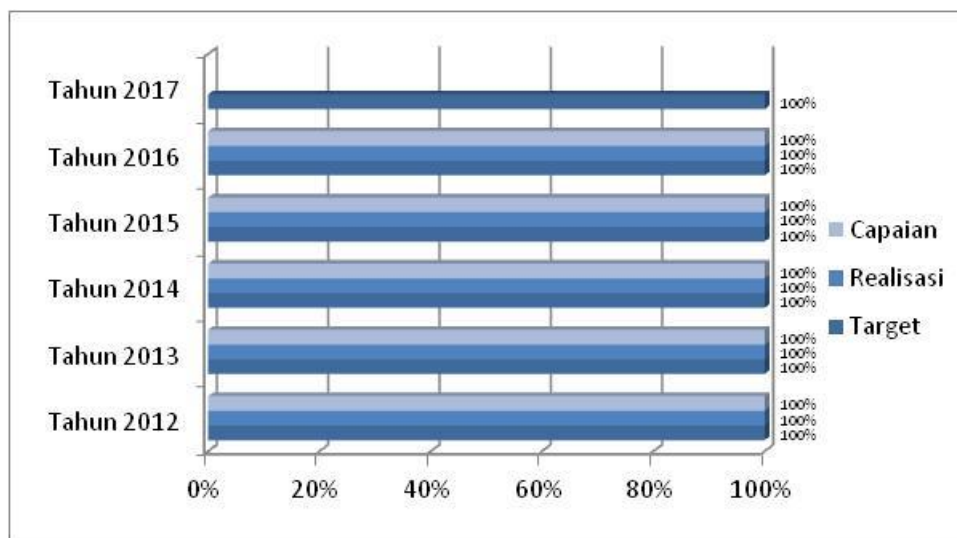
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Meningkatkan Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	1) Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	100 %	100 %	100%
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	81.75%	83,91 %	102,64 %
	3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	10.95%	10,90 %	100,45 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 4</b>				<b>101,03%</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 4 sebesar 101,330 atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 4, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas. Untuk mengukur pencapaian Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.

Indikator Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana tercapai 100% sebanyak 1 (satu) kebijakan yaitu Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional yang ke – 23 Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pencapaian ini tetap bila dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2015 (100%), dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.13**  
**Persentase Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga berencana**  
**Tahun 2012 - 2016**



Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif tercapai sebesar 81,78% dari target yang ditetapkan sebesar 81,75% dengan rumusan :

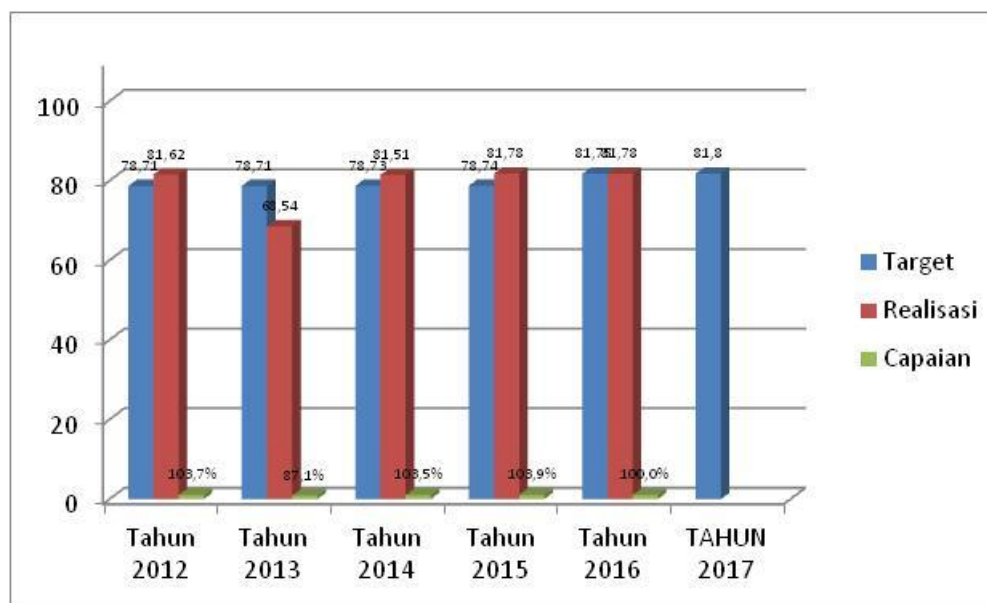
- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS)
- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota ( $572,49 / 7 = 81,78\%$ )

Pencapaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2012 (81,62%) akan tetapi mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2013 (68,54%) dan masih terus meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 (81,51%). Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan kepada masyarakat serta adanya sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan (PK) dinilai dapat meningkatkan capaian tersebut.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif sampai dengan tahun ini sebesar 81,78% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 81,8%, ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja

Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif sudah mendekati dari target tahun terakhir Rencana Strategis, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.14**  
**Tingkat prevalensi peserta KB aktif**  
**Tahun 2012 – 2016**



Indikator Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tercapai sebesar 10,90% dari target 10,95% dengan rumusan :

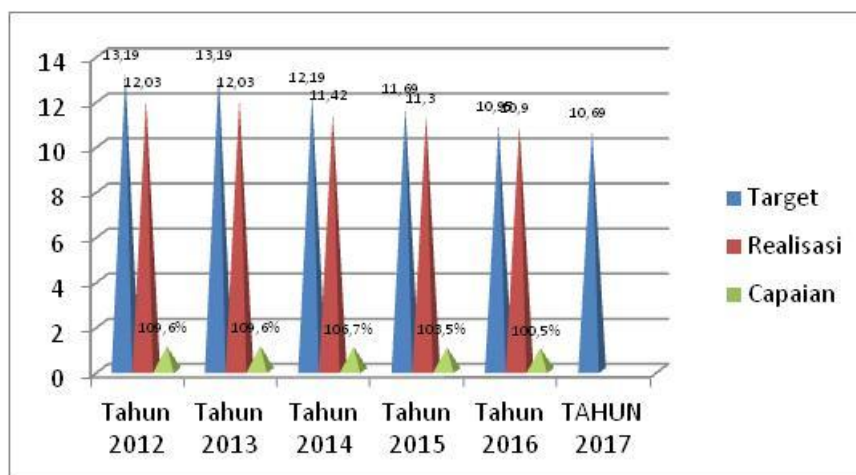
- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibagi dengan jumlah keluarga.
- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota ( $76,3 / 7 = 10,90\%$ ).

Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi persentase Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2012 (12,03%), tahun 2013 (12,03%), tahun 2014 (11,42%) dan tahun 2015 (11,30%).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sampai dengan tahun ini sebesar 10,90% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 10,69%, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.15**  
**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**  
**Tahun 2012 - 2016**



Dalam rangka Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 101,03 dapat dikualifikasikan berhasil.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas” antara lain adalah :

1. Penyediaan alat kontrasepsi dari BKKBN Pusat tidak sesuai dengan minat masyarakat, misalnya Pil KB yang disediakan : Kimia Farma, Noride, Exultion, sedangkan masyarakat menginginkan merk Andalan.
2. Belum optimalnya sinkronisasi, koordinasi dan pembagian kewenangan antara BPPKBPA dengan BKKBN.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Usulan kegiatan tahun berikutnya (Tahun 2017) agar lebih prioritas dalam mencapai sasaran berupa kegiatan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga yang meliputi : sosialisasi, advokasi, rapat koordinasi, dan pembinaan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan menyediakan alat kontrasepsi sesuai minat masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB gratis bagi masyarakat.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

#### **1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016**

Pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebanyak Rp. **9.898.472.599,92** dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. **9.480.634.327,-** atau 95,78% dengan perincian sebagai berikut :

##### **1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 4.849.601.290,92,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 4.647.007.941,- atau 95.82%.

##### **2. Belanja Langsung**

Belanja langsung dianggarkan Rp. 5.048.871.310,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 4.833.626.386,- atau 95.74%.

#### **2. Analisis Keuangan dengan Pencapaian Kinerja**

Dilihat dari realisasi anggaran, dialokasikan anggaran sebanyak Rp. **9.898.472.599,92** dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. **9.480.634.327,-** atau 95,78% yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebanyak Rp. 4.849.601.290,- terealisasi sebanyak Rp. 4.647.007.941,- atau 95.82%. Kemudian Belanja langsung dianggarkan Rp. 5.048.871.310,- terealisasi sebanyak Rp. 4.833.626.386,- atau 95.74%. Hal ini berarti

bahwa dilihat dari sisi kinerja dan anggaran, capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas (98,53%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang (93,90%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran**  
**Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat		<b>282.702.000</b>	<b>268.336.000</b>	<b>94,92%</b>
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0	0	0%
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	108.881.000	107.867.000	99.06%
		Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media	110.620.000	107.260.800	96,96%

		Massa			
		Advokasi dan Pelatihan PPRG Prov.Kep.Babel	63.201.000	53.208.200	84.19%
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		<b>1.176.643.300</b>	<b>1.144.189.060</b>	<b>97.24%</b>
		Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	297.937.000	280.478.960	94.14%
		Pameran hasil karya perempuan	207.657.000	201.914.400	97.23%
		Operasional kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung	458.825.000	455.765.000	99.33%
		Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif	0	0	0%
		Advokasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan	0	0	0%
		Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan	76.242.000	73.886.200	96.91%
		KIE Partisipasi Politik Perempuan	135.982.300	132.144.500	97.18%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		<b>1.083.665.010</b>	<b>1.017.509.312</b>	<b>93.90</b>
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	131.858.000	111.973.600	84,92%
		Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak	0	0	0%
		Pembinaan Partisipasi Hak Anak	230.038.000	230.038.000	100%
		Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak	75.126.000	73.825.702	98.27%
		Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak	47.189.810	47.189.810	100%
		Bimbingan teknis pelaporan SPM Bidang layanan Terpadu bagi	44.783.200	41.044.200	91.65%



		Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			
		Operasional Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	354.670.000	313.438.000	88,37%
		Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000	200.000.000	100%
Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga		<b>820.666.000</b>	<b>808.599.250</b>	<b>98.53%</b>
		Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)	399.421.000	393.070.200	98.41%
		Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)	376.613.000	375.997.850	99.84%
		Sosialisasi Reproduksi Sehat bagi Remaja	44.632.000	39.531.200	88.57%
<b>TOTAL</b>			<b>3.363.676.310</b>	<b>3.238.633.622</b>	<b>96.28%</b>